

Implementasi Program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang

Yayat Sudrajat^{1*}, Indra Kristian², Fitri Febriani³

^{1,3} Universitas Subang, Subang, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: yayatunsub67@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 08-10-2024)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-12-2024)

ABSTRAK

Program posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan Pemerintah melalui pelayanan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan dalam observasi yakni implementasi program posyandu lansia belum optimal dilaksanakan, sehingga banyak masyarakat khususnya lansia yang belum memahami program posyandu lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit implementasi program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Didukung teori implementasi Edward III terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kader Posyandu Lansia, Kader Posyandu Lansia, dan Para Lansia. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber referensi diperoleh melalui studi literature terkait program posyandu lansia. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang masih belum optimal dalam memenuhi dimensi teori Implementasi Edward III. Kurangnya koordinasi dan monitoring masih menjadi kendala Utama program posyandu lansia. Keterbatasan sumber daya dan akses juga menjadi hambatan pelaksanaan program posyandu lansia.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program, dan Posyandu Lanjut Usia

Yayat Sudrajat, et al. 2024. Implementasi Program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik Kesehatan secara fisik, Kesehatan mental, Kesehatan spiritual, maupun Kesehatan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan, "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif". Sehat jiwa pada yang dimaksud sudah meliputi sehat mental dan spiritual, serta hidup produktif sudah menggambarkan kehidupan ekonomi yang sehat. Undang-undang ini juga menjamin upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk upaya kesehatan jiwa di tempat kerja. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. Hak masyarakat atas kesehatan juga ditetapkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan".

Penduduk lansia perlu mendapatkan pembinaan agar menjadi lebih berkualitas dan produktif sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Indikator masyarakat yang sejahtera yaitu merujuk pada masalah kesejahteraan sosial dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Indonesia Sehat 2025 adalah program strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dalam program Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga mendapatkan jaminan kesehatan, yaitu mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Masyarakat. Pelayanan Kesehatan bermutu yang dimaksud disini adalah pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan Kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana.

Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan yang baik dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang tinggi.

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat perhatian yang diberikan terhadap perkembangan dan kebutuhan setiap kelompok usia. Misalnya, terdapat program-program kesehatan yang ditujukan untuk anak-anak, seperti imunisasi dan pelayanan kesehatan anak. Selain itu, terdapat juga program-program yang ditujukan untuk remaja, seperti pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Untuk kelompok usia dewasa, terdapat program-program kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit, gaya hidup sehat, dan pelayanan kesehatan umum. Sedangkan untuk lansia, terdapat program-program kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan lanjut usia dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lanjut usia atau Lansia adalah golongan masyarakat yang telah memasuki usia senja atau tua. Dalam usia ini, manusia tidak lagi dalam usia

produktif untuk menghasilkan sesuatu seperti diwaktu usia produktif. Orang yang memasuki lanjut usia biasanya lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu program atau kegiatan yang dapat memantau keadaan kesehatan para lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang dalam sektor pemerintahan, seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Perumusan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis kebijakan, dan pembuatan keputusan. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan.

Kebijakan adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2019, hlm. 46). Untuk itu, berbagai keputusan yang diamanatkan pada suatu kebijakan haruslah memiliki tujuan yang menjunjung kepentingan publik, bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.

Sementara itu Fredrickson (dalam Rodiyah dkk, 2021, hlm. 63) kebijakan publik adalah keseluruhan tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok atau pemerintah pada sebuah lingkungan tertentu di mana dalam lingkungan tersebut dijumpai kesulitan-kesulitan serta memiliki kesempatan dalam melaksanakan usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan setelah kebijakan telah diformulasikan dan disetujui. Tahap ini melibatkan implementasi rencana atau keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aspek, termasuk dimensi organisasi, kepemimpinan, dan manajerial dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab.

Van Meter & Van Horn (1974 dalam Agustino 2017, hlm. 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan.

Pengertian implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada bidangnya. Secara umum, implementasi kebijakan publik melibatkan tindakan konkret untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup alokasi sumber daya, pengaturan prosedur,

pelaksanaan program, dan koordinasi antar lembaga.

Implementasi kebijakan juga melibatkan dimensi sosial, seperti membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik dapat mempengaruhi dukungan dan penerimaan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

C. METODOLOGI PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam sistem dan kehidupan kerja organisasi pemerintah (Subagyo, A., Kristian, I., (2023). Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi terkait Posyandu Untuk Lansia, dan fenomena yang terjadi dilapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Posyandu Lansia dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan publik karena merupakan suatu

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencegah dan mengurangi masalah Kesehatan yang terjadi pada lansia khususnya di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang. Program Posyandu Lansia di Desa Cimeuhmal telah diimplementasikan dengan berlandaskan pada Surat Keputusan Kepala Desa Cimeuhmal tentang Penetapan Posyandu Lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia.

Pusat kegiatan dari posyandu lansia ini terletak di Pos Kesehatan Desa Cimeuhmal di RW 1 sampai RW 6. Posyandu lansia ini bernama "Posyandu Lansia Mawar". Kegiatan posyandu dilakukan 1 kali dalam 1 bulan tetapi untuk senam lansia dilakukan setiap hari Sabtu..

Pelaksanaan program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal dilaksanakan dengan sistem lima meja / lima pelaksanaan kegiatan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meja 1 Pendaftaran oleh Kader Posyandu.
2. Meja 2 untuk penimbangan oleh Kader Posyandu.
3. Meja 3 untuk pencatatan hasil oleh Kader Posyandu.
4. Meja 4 untuk penyuluhan perorangan, merujuk dan menyebarkan informasi tentang berbagai program Kesehatan oleh Kader Posyandu.
5. Meja 5 untuk pelayanan medis.

Dalam pelaksanaan program posyandu lansia dengan sistem lima meja, peran kader lansia sangatlah penting. Kader posyandu lansia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang Kesehatan dan kinerja kader posyandu lansia memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan lansia, dimana semakin baik kinerja kader posyandu akan berdampak terhadap kepuasan lansia sebagai kelompok sasaran

kesehatan dari Posyandu juga akan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Program Posyandu Lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang yang dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi merupakan hal yang penting dalam meneruskan pesan dari atas ke bawah atau dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi. Agar implementasi berjalan dengan baik, maka komunikasi sangat diperlukan untuk mengalirkan perintah, petunjuk, serta arahan mengenai pelaksanaan program.

Dalam konteks pemerintahan dan layanan publik, komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang program, membangun dukungan masyarakat, dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang dilihat dari sudut komunikasi masih belum berjalan dengan lancar apabila kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan masyarakat, juga dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program posyandu lansia.

Terkait dengan Komunikasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kader Posyandu Lansia, Ibu Anih Nurhayati beliau menyatakan bahwa komunikasi yang berjalan dalam implementasi program posyandu lansia

belum berjalan dengan lancar dan perlu dipertingkatkan.

Kendala yang dihadapi Kader posyandu lansia Desa Cimeuhmal dalam menyampaikan informasi kepada lansia yaitu susahnya merubah lansia agar lebih baik, pihak Puskesmas Tanjungsang juga selalu membantu dalam memberikan pengarahan tentang makanan yang harus dihindari oleh lansia namun kenyataannya lansia tersebut tetap saja tidak bisa merubah pola makannya. Kendala lain juga muncul dari para lansia yang ada di Desa Cimeuhmal yaitu pertama kurangnya kesadaran lansia akan pentingnya posyandu lansia, karena melihat dari persentase yang mengikuti posyandu hanya 24,35% dari jumlah seluruh lansia yang ada di Desa Cimeuhmal.

Lansia memberi alasan untuk tidak mengikuti posyandu lansia yaitu karena kesibukannya sehari-hari menjaga cucu dan pada kebiasaannya keluarga tidak mengetahui jadwal pelaksanaan posyandu lansia. Kendala yang kedua adalah kurangnya dukungan keluarga untuk mengantar/mengingatkan lansia untuk datang ke posyandu, mengingat kesulitan lansia untuk berjalan kaki ke lokasi Pos Posyandu Lansia. Anggota keluarga bisa menjadi motivator kuat bagi lansia apabila menyediakan diri untuk mendampingi atau mengantar lansia ke posyandu. Sebenarnya banyak lansia yang sudah mengetahui adanya program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, namun karena kendala tersebut yang membuat lansia tidak mengikuti posyandu lansia.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan melalui indikator sumber daya. Indikator ini meliputi, Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya yang ada di

Posyandu lansia Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan posyandu lansia.

Dalam pelaksanaan program, sumber daya manusia memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Sumberdaya manusia yang terampil, terorganisir, dan terlibat secara efektif dalam perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan manajemen program memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Dengan memastikan bahwa Sumber daya manusia terlibat memiliki keterampilan dan dukungan yang diperlukan, program dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Dari segi jumlah para kader yang ada di posyandu lansia Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang, belum cukup memadai sehingga dalam melaksanakan tugasnya kader harus melakukan lebih dari satu tugas. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para kader sudah cukup baik dalam memahami tugas dan fungsi tugas di posyandu. Hanya yang menjadi kendala disebabkan oleh jumlah kader masih kurang memadai, sehingga menjadi hambatan dalam implementasi program posyandu lansia.

Dalam pelaksanaan program, sumber daya anggaran memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Transparansi, akuntabilitas, dan pengalokasian prioritas yang tepat juga merupakan faktor penting dalam penggunaan sumber daya anggaran secara efektif.

Sumber daya anggaran pada program posyandu lanjut usia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang hanya bersumber dari dana Desa setempat. Sumber dana juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu

program jika sumber dana yang tersedia masih terbatas maka dapat menyebabkan implementasi dari program tersebut belum berhasil. Terdapat kendala yang dihadapi dalam anggaran ini yaitu tidak semua lansia mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan ini yang dijadikan alasan para lansia yang ada di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang untuk tidak ikut dalam program posyandu lansia, karena nama mereka tidak terdaftar dalam penerima PMT. Puskesmas Tanjungsang mengatakan bahwa PMT hanya diberikan kepada lansia yang aktif dalam kegiatan posyandu dan sering datang dalam setiap kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaan program Posyandu, sumberdaya peralatan, sarana, dan prasarana memainkan peran penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sumber daya peralatan, sarana, dan prasarana yang efektif dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program Posyandu dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, sarana dan prasarana masih belum memadai membuat masyarakat lansia semakin tidak semangat untuk datang karena jika ramai yang datang maka sebagian lansia harus menunggu diluar.

Dari sumber daya informasi dan kewenangan yang dimiliki para kader posyandu lansia Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang sudah baik. Informasi yang menjadi peran sebagai alat untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi supaya diantara mereka mau menjalankan dan patuhi apa yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Dari hasil wawancara didapati bahwa sumberdaya manusia, sumberdaya

peralatan belum berorientasi kepada dimensi implementasi George C. Edward III dimana sumberdaya masih belum mencukupi sesuai dengan perencanaan program. Sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan, sarana, dan prasarana perlu diperbaiki dan diberikan perhatian lebih agar pelaksanaan posyandu lansia dapat berjalan lancar.

Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Dalam melaksanakan program posyandu lansia, tidak semua pihak mendukung kegiatan ini. Puskesmas Tanjungsiang melakukan pengawasan dan pengendalian kepada kader posyandu agar terlaksananya suatu program sesuai dengan yang direncanakan. Petugas Puskesmas Tanjungsiang selalu memberikan pengarahan/penyuluhan yang bermanfaat terkait kesehatan para lansia, dan para lansia juga menunjukkan respon yang baik akan hal itu dengan mengajukan pertanyaan ketika ada perihal yang tidak di mengerti oleh lansia. Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dibahas menggambarkan bahwa implementasi program posyandu lansia belum berorientasi kepada dimensi disposisi. Hal ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan Kunci yang menyatakan bahwa perihal yang dianggap kurang oleh para lansia sebagai kelompok sasaran program ini dalam kegiatan posyandu lansia yaitu ketika petugas puskesmas berhalangan datang untuk memberikan pengarahan,

sehingga kaderlah yang memberi pengarahan terkait materi yang sudah diberikan oleh petugas puskesmas untuk disampaikan kepada lansia.

Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari struktur birokrasinya yang terdapat 2 karakteristik yaitu Fragmentasi dan SOP (Standar Operasi Prosedur). Standar Operasi Prosedur merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. SOP dibuat agar kegiatan berjalan dengan sistematisnya Posyandu Lansia Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang menggunakan sistem pelayanan lima meja yaitu meja pertama sebagai tempat pendaftaran, meja kedua sebagai tempat penimbangan, meja ketiga sebagai pencatatan hasil, meja keempat sebagai tempat penyuluhan perorangan, merujuk dan menyebarluaskan informasi, dan meja kelima pelayanan medis.

Fragmentasi ialah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Di dalam struktur organisasi Posyandu Lansia Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang terdapat bagian dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi terdiri dari pembina, ketua kader, sekretaris, bendahara dan anggota. Setiap bagian bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Unit-unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu lansia telah berkoordinasi dengan baik melalui pertemuan rutin. Akan tetapi, meskipun antara unit-unit organisasi dalam organisasi sudah terhubung dengan baik, namun kepada kelompok sasaran masih belum tersampaikan dengan baik.

Setelah melihat dari hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa bilangan kader masih belum mencukupi dan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan. Kekurangan kader juga menghambat proses informasi dan edukasi terhadap lansia. Setelah melihat hasil wawancara, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi program posyandu lansia masih belum berorientasi dengan dimensi struktur birokrasi dalam teori Implementasi George C. Edward III.

E. KESIMPULAN

Implementasi Program Posyandu Lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan empat dimensi dari Teori Implementasi George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jika dilihat dari hasil penelitian, implementasi program posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang belum berorientasi dengan Teori Implementasi George C. Edward III. Berdasarkan empat dimensi implementasi George C. Edward III yang telah diteliti, dapat ditarik kesimpulan dari dimensi komunikasi, didapati bahwa alur Komunikasi dalam pelaksanaan program posyandu lansia antara berbagai pihak terkait, seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Kader posyandu lansia dan pihak puskesmas sulit untuk memastikan kehadiran lansia untuk mengikuti posyandu lansia. Kurangnya dukungan keluarga sebagai motivator dalam mengingatkan lansia atau mendampingi lansia untuk datang ke posyandu lansia.

Dari dimensi sumber daya, dapat disimpulkan bahwa sumber daya anggaran dalam implementasi program posyandu lanjut usia di Desa

Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang masih kurang, dimana sumber daya anggaran yang ada hanya berasal dari dana desa setempat. Sumber daya Manusia dalam implementasi program posyandu lansia juga terbatas sehingga adanya kader merangkap tugas dalam pelaksanaan program yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan bagi lansia. Sarana dan prasarana dalam implementasi program posyandu lansia belum mencukupi untuk menampung kelancaran program posyandu lansia.

Dari dimensi disposisi, dapat dilihat sikap pelaksana program yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat berdampak terhadap implementasi program posyandu lansia. Permasalahan yang sering berlaku yaitu ketika petugas puskesmas berhalangan datang untuk memberikan pengarahan, sehingga kaderlah yang memberi pengarahan terkait materi yang sudah diberikan oleh petugas puskesmas untuk disampaikan kepada lansia sehingga pelaksanaan program tidak optimal.

Dari dimensi struktur birokrasi, kurangnya kader posyandu lansia menyebabkan Standar Operasi Prosedur pelaksanaan sistem 5 meja tidak dapat dijalankan dengan baik. Adanya kader merangkap tugas dalam pelaksanaan program yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan bagi lansia.

Saran pada proses penyaluran informasi mengenai posyandu lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang perlu adanya peningkatan, sehingga lansia secara keseluruhan mendapatkan informasi mengenai posyandu tersebut, sehingga program posyandu lanjut usia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni kesejahteraan lansia untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan melalui posyandu dapat terjangkau secara keseluruhan. Komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk membangun kesadaran lansia dan keluarga akan pentingnya posyandu lansia. Kader posyandu lansia perlu menghadiri lebih banyak pelatihan agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan program posyandu lansia.

Ketersedian para kader perlu untuk diperhatikan karena sumber daya manusia merupakan sumber utama dalam setiap program yang dijalankan, Untuk itu, jumlah dan kemampuan kader pada program posyandu lanjut usia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang harus diperhatikan idealnya jumlah dan kemampuan yang dimiliki para kader sangat menjadi pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan posyandu lanjut usia. Sumber daya anggaran juga perlu dipertingkatkan sumber pendanaan dan dapat diperoleh juga dari sumber selain dari anggaran dana desa. Apabila sumber daya anggaran meningkat, segala permasalahan terkait sumber daya peralatan dapat diselesaikan.

Perlu adanya koordinasi yang baik antara petugas puskesmas dengan pihak penyelenggara program posyandu lansia agar pelaksanaan posyandu bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana program masing-masing. Sehingga tidak adanya disposisi antara petugas puskesmas dengan kader posyandu lansia yang dapat menyebabkan tidak tersampainya informasi kepada lansia dengan baik.

d. Adanya penambahan jumlah kader posyandu dan kualitas pengetahuan dari kader posyandu lansia tersebut agar struktur birokrasi didalamnya dapat berjalan dengan efektif serta tidak adanya tumpang tindih tugas pokok dan

fungsi dari kader posyandu tersebut sesuai dengan Standar Operasi Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta: Bandung.
- Ayuningtyas, D. 2018. Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- Azema, Z.A. 2018. Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Posyandu Lansia Srdati Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Dokumen-Dokumen
- Edward III, George C. 1990. Public Policy Implementing. Jai Press Inc: London.
- Fatmah. 2010. Gizi Usia Lanjut. Erlangga: Jakarta.
- Inten Soeweno. 2010. Pedoman pelaksanaan posyandu lanjut usia. Komisi Nasional Lanjut Usia: Jakarta.
- Kristian, I. (2022). Sustainable Development and Public Policy Revitalization. The International Journal of Education Management and Sociology, 1(2), 41-50.
- Kristianti.R.A. 2013. Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di RW IV Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. UNESA: Surabaya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook. SAGE: Arizona State.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda karya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian

- Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya Offset: Bandung.
- Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori administrasi publik. Alfabeta: Bandung.
- Taufik, M. 2022. Hukum kebijakan publik teori dan praksis. Tanah Air Beta: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
- Wahyudi, Nugroho. 2008. Keperawatan Gerontik dan Geriatrik. EGC: Jakarta..
- Purwanto, N.A. 2020. Administrasi pendidikan (teori dan praktik di lembaga pendidikan). Intishar Publishing: Yogyakarta.
- Rodiyah, I. Sukmana, H. Mursyidah, L. 2021. Pengantar ilmu administrasi publik. Umsida Press: Sidoardjo.
- Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Aksara Global Akademia.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, 3(2), 116-127.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian